



Analisis Keterampilan Profesional Guru dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Sekolah Dasar

Rizki Ananda¹, Reka Resvita², Septian Mulyadi³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia

E-mail: rizkiananda.mhs.upi@gmail.com, rekaresvita@gmail.com, septianmulyadi002@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-01 Keywords: <i>Policy Analysis; Teachers; Development.</i>	Teachers play a very strategic role in carrying out their mandate and achieving national educational goals. The role of teachers is difficult to be replaced by others, especially in a multicultural and multidimensional society. Therefore, teacher mentoring and professional development should always be a top priority. The purpose of this study is to analyze educational policies related to teacher professional development and improvement. The research method used in this study is a qualitative research method with descriptive case study nature. The results of this study suggest that with the presence of educational policies to develop and improve the teaching profession, the status of teachers is increasingly overshadowed by legal sources, while through professional teacher education teachers acquire more knowledge and professionalism than teachers Spirit.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-01 Kata kunci: <i>Analisis Kebijakan; Guru; Pengembangan.</i>	Guru memegang peran yang sungguh dalam kerangka melaksanakan guna serta menghasilkan tujuan pembelajaran nasional. kedudukan guru nyaris tidak dapat digantikan oleh yang lain, lagi pula di dalam publik yang multikultural serta multidimensional. Oleh akibat itu pembinaan serta pengembangan pekerjaan guru perlu sering selaku prioritas mendasar. riset ini bermaksud buat menilik peraturan pembelajaran yang bersangkutan dengan pengembangan serta kenaikan pekerjaan guru. sistem riset yang digunakan dalam riset ini merupakan cara kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif riset masalah. Hasil riset ini membuktikan kalau dengan terdapatnya peraturan pembelajaran hal pengembangan serta kenaikan pekerjaan guru, posisi guru kian dinaungi oleh asal muasal hukum dan juga dengan terdapatnya pembelajaran karier Guru, guru selaku lebih ada pemahaman serta profesionalitas selaku guru.

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran ialah bagian yang sungguh bernilai buat kehidupan khalayak, pembelajaran mampu menekan kenaikan mutu khalayak dalam wujud melonjaknya kompetensi kognitif, afektif, atau psikomotor. Permasalahan yang dalam usaha memulihkan serta meninggikan mutu kehidupan sungguh permukiman, banyak sebab yang mesti dipikirkan gara-gara pengaruhnya p memiliki kehidupan khalayak tidak mampu diacapkan, yang jelas diketahui jika pembelajaran ialah salah satu sebab yang mampu meninggikan mutu akarenergi khalayak sesuatu bangsa (Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2012; pengasih, 2014). Seiring dengan kemajuan masa serta masa kesejagatan yang sungguh laju menuntut terdapatnya kenaikan kualitas pembelajaran. Tiap-tiap sistem pembelajaran mesti sanggup melaksanakan pergantian-perumateri ke arah ralat serta kenaikan kualitas (Goodwin, 2014). Dalam usaha pembinaan pembelajaran nasional, sungguh dibutuhkan guru (tutor) dalam standard kualitas kompetensi serta handalisme

yang terjaga. Guna menyentuh jumlah guru karieronal yang mampu mengkegiatan gelora pertumbuhan pembelajaran nasional dibutuhkan sesuatu cara pembinaan bersambung-sambung, pas incaran serta efisien (Petrie & Mcgee, 2012).

Peradaban memiliki peran bangsa manaserta terhitung Indonesia, karier guru berpengaruh diplomatis gara-gara penyansertagnya mengemban kewajiban buat cara kemandirian, pamanuran, pencerdasan, pemrasaman, serta pembangun watak bangsa. Arti diplomatis guru sekalian meniscayhendak pengakuan guru selaku karier. Lahirnya Unsertag-unsertag (UU) nomor. 14 Tahun 2005 perihal Guru serta Dosen, ialah wujud jelas pengakuan sehubungan karier guru dengan seluruh dimensinya. Di dalam UU nomor. 14 Tahun 2005 ini dituturkan jika guru merupakan tutor handal dengan kewajiban penting memelihara, menggembleng, membimbing, menunjukan, melatih, memperhitungkan, serta menyurvei kontestan asuh pada pembelajaran anak usia dini urat pembelajaran resmi, pembelajaran dasar, serta pembelajaran

menengah. Selaku keterkaitan dari UU nomor. 14 Tahun 2005, guru mesti melaksanakan cara sertifikasi buat menemukan lisensi pembimbing. Guru yang dinaikan semenjak diunsertagkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam unit, yang diharapkan mampu berakhir dekati dengan 2015.

Pada cakupan yang lebih lapang, pengakuan sehubungan karier guru selaku lateral menunjukkan banyak ide.

1. Ke 1, dibutuhkan ekstrakapasitas buat sediakan ide. Guru yang handal dalam jumlah yang lumayan, akibatnya kontestan asuh merambah sofa sekolah tidak terperangkap pada perihal yang sia-sia imbas layanan pembelajaran serta pengajian pengkajian yang tidak baik (Phillips, 2013).
2. Ke 2, regulasi yang implementasinya tunduk landasan dalam penempatan serta penugasan guru supaya tidak terjalin pemisahan akses layanan pembelajaran buat mereka yang terletak pada titik-titik terluar daerah negeri, di tempat-tempat yang susah dijangkau gara-gara keterisolasian, serta di wilayah-wilayah yang penuh konflik.
3. Ke 3, komitmen guru buat menghasilkan hak seluruhnya penduduk negeri sehubungan pembelajaran yang bermutu dengan pensertaaan serta pengaturan negeri sehubungan sistem pembelajaran. Keempat, meninggikan keselamatan serta status guru dan stamina kepembelajaran yang ada dengan aplikasi yang efisien sehubungan hak dasar serta privilese handal mereka.
4. Ke 4, meniadakan seluruh wujud pemisahan layanan guru dalam bagian pembelajaran serta pengajian pengkajian, khususnya yang berhubungan dengan jender, suku bangsa, status perkawinan, kekuranganggupan, arah intim, usia, agama, hubungan politik aliasopini, status sosial serta ekonomi, marga bangsa, adat istiadat, dan menekan penjelasan, keterbukaan, serta pujian sehubungan kesepakatan buenergi komunitas (Goodwin & Kosnik, 2013).
5. Ke 5, menekan kerakyatan, pembangunan terus-menerus, perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesembuhan serta keamanan, dengan kesetiakawanan serta operasisesuai di antara unit komposisi guru di mancanegeri, gerhendak komposisi kekaryaan global, serta rakyat masertai (Besharov & Oser, 2014).

Beranjak dari filsafat prinsiptis di sehubungan, dibutuhkan usaha buat merumuskan peraturan serta pengembangan karier guru. Itu penyebabnya, akhir-akhir ini kian kokoh motivasi buat melaksanakan riset kembali sehubungan sistem manajemen guru, paling utama berhubungan dengan penyediaan, sistem penyaluran, sertifikasi, kenaikan kualifikasi serta kompetensi, penghitungan kemampuan, percobaan kompetensi, pujian serta proteksi, keselamatan, pembinaan pekerjaan, pengembangan kekarieran terus-menerus, pengawasan etika karier, dan manajemen guru di daerah tertentu yang relevan dengan permohonan kekinian serta periode depan (Asmarani, 2014).

Keberadaan guru yang handal serta berkompeten ialah sesuatu kemestian buat mempermudah peranguhan tujuan pengajian pengkajian. Guru yang handal sanggup merefleksikan wujud keguruannya dengan paham yang lapang serta ada beberapa kompetensi yang mendukung kewajibannya (Sobri, 2016). Usaha pengembangan karieronalisme guru butuh lantas digeluti selaku terus-menerus biar pemahaman, penjelasan serta kepiawaian mereka yang bersinggungan dengan kewajibannya sering mencontoh kemajuan pertumbuhan mayapada pembelajaran (Supriadi, 2013). Guna tujuan itu, departemen pembelajaran serta tamadun sering berikhtiar buat mencukupi peraturan di bagian pembinaan serta pengembangan karier guru.

II. METODE PENELITIAN

Riset ini memanfaatkan sistem penelitian pustaka alias studi kesusastraan dengan pendekatan library research. Referensi yang selaku asal muasal referensi dari informasi-artikel dalam surat kabar rasional, novel, artikel individu, dan arsip pendukung lain. Hasil pencarian penelitian pustaka buat merangkum inti ulasan cocok poin yang dicermati, akibatnya mampu menguatkan serta menyokong definisi di dalam analisis ini. Tilikan ini digeluti bermacam sebab yang terikat dengan skandal yang dicermati, dalam studi ini skandal yang dicermati perihal peraturan pengembangan serta kenaikan karier guru dalam rang buat menghasilkan tujuan pembelajaran nasional. Riset ini memfokuskan diri selaku intensif peraturan pengembangan serta kenaikan karier guru serta mempelajarinya selaku sesuatu skandal. Informasi yang diperoleh dalam studi ini berawal dari bermacam asal muasal serta hasil studi yang bersinggungan dengan skandal yang diselidiki. Sumber analisis diidentifikasi dari prinsip dan analisis artikel rasional yang tercantum didalam

surat kabar online. Dalam cara analisis ini, digeluti penelaahan rujukan selaku asal muasal data yang selanjutnya diringkas buat menyentuh kesimpulan. Pendekatan analisa data yang merupakan pendekatan kualitatif. Melewati serangian tindakan studi, mampu dihidangkan hasil kritik bermacam studi yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isu dan Fenomena Kebijakan Publik

Dalam peraturan pengembangan serta kenaikan guru ini banyak ditelaah perihal isi perihal kenaikan serta pengembangan karier guru yang saat ini meningkat di perantara perihal perumateri pola PLPG selaku PPG. Bagi Wahab (2012) jika lingkup analisa peraturan orang banyak (public policy analysis), arti yang dalam terminologi "gosip" bukan serupa apa yang rata-rata dimengerti oleh orang umum dalam diskusi sehari-hari. Jadi pada intinya isu-isu peraturan (policy issues) biasanya timbul gara-gara terjalin silang pandangan di antara para wali kebutuhan perihal arah kegiatan yang alias hendak ditempuh, alias kontradiksi amatan perihal watak kasus itu sendiri.

2. Analisis Kebijakan Publik

Analisis peraturan ialah studi sosial terapan yang selaku terorganisasi disusun dalam rang mengerti pokok dari peraturan supaya mampu diketahui selaku jelas data perihal permasalahan-permasalahan yang dijawab oleh peraturan serta permasalahan-periodelah yang barangkali kelihatan selaku imbas dari aplikasi peraturan. Ruang lingkup serta sistem analisa peraturan rata-rata berkarakter deskriptif serta objektif perihal sebab-sebab serta akibat-akibat sesuatu peraturan. Bagi Fattah & Latifah (2012:134) jika peraturan orang banyak mengarahkan pada seluruhnya daerah kegiatan penguasa yang menghampar dari peraturan ekonomi sampai peraturan yang rata-rata merujuk pada peraturan sosial terhitung pembelajaran, kesehatan, serta daerah keselamatan yang ada. Peraturan pembelajaran khususnya peraturan perihal Pengembangan serta kenaikan karier guru paling tidak mesti melengkapi tantangan serta permohonan internasional serta kemajuan waktu seperti mana disampaikan oleh Fattah & Latifah (2012:145) jika analisa peraturan pembelajaran mendeskripsikan macam mana negeri memikirkan serta mengarah pada prioritas pembelajaran, selanjutnya hasil analisa itu mesti dijabarkan

oleh terdapatnya sebab-sebab internasional peraturannya.

Dunn (2016) mengemukakan jika analisa peraturan merupakan sesuatu tertib ilmu sosial terapan yang memanfaatkan bermacam rupa sistem studi serta alasan buat menciptakan serta memindahkan data yang relevan dengan peraturan, akibatnya mampu digunakan ditingkat politik dalam rang membongkar periodelah-periodelah peraturan. Mead (2015) mengemukakan jika the product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisa peraturan orang banyak lebih ialah nasehat alias bahan estimasi penggarap peraturan orang banyak yang mengandung perihal masalah yang, kewajiban yang hendaklah digeluti oleh komposisi orang banyak berhubungan dengan masalah itu, serta jua bermacam pilihan peraturan yang barangkali mampu diperoleh dengan bermacam penilaiannya berlandaskan tujuan peraturan.

Tilikan peraturan orang banyak bermaksud berikankan saran buat menolong para penggarap peraturan dalam usaha membongkar masalah-masalah orang banyak. Di dalam analisa peraturan orang banyak tampak data-data berhubungan dengan masalah-masalah orang banyak dan alasan-alasan perihal bermacam pilihan peraturan, selaku bahan estimasi alias masukan terhadap pihak penggarap peraturan (Hanushek, 2015). Tilikan peraturan orang banyak berlandaskan analisis kebijaksanaannya mampu dibedakan antara analisa peraturan saat sebelum terdapatnya peraturan orang banyak khusus serta setelah terdapatnya peraturan orang banyak khusus. Analisis peraturan saat sebelum terdapatnya peraturan orang banyak berpatokan pada kasus orang banyak semata akibatnya hasilnya benar-benar semacam saran peraturan orang banyak yang terkini (Haddad, 2013). Ke2nya cakap analisa peraturan saat sebelum atau setelah terdapatnya peraturan ada tujuan yang sama ialah memberikan saran peraturan terhadap pemutus peraturan supaya diperoleh peraturan yang lebih bermutu.

3. Analisis kebijakan prospektif

Analisis peraturan perspektif yang berbentuk pembuatan serta transfigurasi data saat sebelum kelakuan peraturan diawali serta diimplementasikan. analisa peraturan disini ialah sesuatu perkakas buat mensintes

hendak data buat digunakan dalam merumuskan pilihan serta preferensi peraturan yang diumumkan selaku komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif serta kualitatif selaku basis alias instruktur dalam pengumpulan ketentuan peraturan.

4. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis peraturan retrospektif merupakan selaku pembentukan serta transfigurasi data setelah kelakuan peraturan digeluti. tampak 3 kategori analisis berlandaskan tindakan yang dibesarkan oleh regu analisis ini ialah analisis yang berkiblat pada tertib, analisis yang berkiblat pada masalah serta analisis yang berkiblat pada aplikasi. tetap saja ketiga kategori analisa retrospektif ini tampak kapabilitas sertakelemahan.

5. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi ialah wujud Analisa yang mencampurkan style pembedahan para praktisi yang menempatkan perhatian pada pembentukan serta info saat sebelum serta telah kegiatan kebijakan diperoleh. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak cuma menetapkan para analisis buat mengkaitkan tahapan penelitian retrospektif serta perspektif, tapi jua menuntut para analisis buat lantas melesap menciptakan serta mentransformasikan informasi tiap-tiap ketika. Salah satu sebab dibutuhkan kebijakan orang banyak, gara-gara terjalin kekalahan pasar (public failure) serta kekalahan penguasa (government failure), hingga penguasa ada rol yang sungguh besar dalam perangkuhan peruntukan asal muasal ekonomi yang efektif (Weimer & Vining, 2017).

6. Analisis Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru

Dilihat dari hal pembelajaran Indonesia saat ini, guru sedang belum selaku handal melakukan tugas serta tanggung jawabnya. H.A.R Tilaar serta Riant Nugroho mengamati cara tutoran selaku pengembangan pembawaan melingkupi usaha yang sungguh lapang, tampak banyak teori perihal pembawaan, strukturnya, pengembangannya, dan tujuannya. Cara pemberdayaan stamina penasuh serta kontestan asuh berarti memuliakan kebersendirian dari individu khalayak serta bukan merampas hak-hak asasinya serta prestise stamina tutor serta kontestan asuh selaku khalayak (Tilaar & Nugroho, 2012).

Mutu pembelajaran sedang ringan, perihal ini jua gara-gara kualitas guru sendiri sedang

ringan. Memanglah bukan seluruhnya salah guru, namun guru serta tutor merupakan titik esensial pembelajaran. Andaikan mutu guru mampu dinaikkan hingga mutu pembelajaran jua mampu meninggi. Hingga dari itu, butuh diadakan sertifikasi yang selaku efisien mampu membuat guru-guru di Indonesia lebih profesional (Asmarani, 2014). Bagi UU nomor 14 tahun 2005 jika prospek karier guru merupakan handal, terbentengi serta damai makmur. UU Guru jua memberi proteksi hukum, terhitung proteksi karier, keselamatan, garansi sosial, hak serta keputusan.

Guru ada kategorisasi, kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikasi. Guru ada tugas penting memelihara, menggembleng, membimbing, menunjukkan, melatih, memperhitungkan, menyurvei kontestan asuh (Kimshanov & Dyikanbaeva, 2015). Menurut kebijakan, guru handal ada panggilan jiwa serta idealisme, sanggup meninggikan kualitas pembelajaran, ada kualifikasi akademik, ada kompetensi cocok tugasnya, tanggung jawab handal, pendapatan cocok performa, sanggup meningkatkan kekarierannya selaku terus-menerus, garansi proteksi hukum serta ada komposisi karier (Agung, 2015; Mustofa, 2017). Dalam usaha menghasilkan Guru handal, ada sebagian nilai yang butuh dicermati, antara lain merupakan:

- a) Konsistensi terhadap standarisasi karier Guru seperti mana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan seluruh konsistensinya.
- b) Mewujudkan pembinaan karier Guru selaku daur yang bersambung-sambung serta silih menyokong (mulai dari pra-unit, cara rekrutmen serta pembinaan Guru dalam unit).
- c) Melakukan penyempurnaan manajemen Guru cocok dengan karakteristiknya.
- d) Mewujudkan sinergi kedudukan serta tanggung jawab antara Guru, penguasa, LPTK serta formasi job (Gunawan, 2013).

Pembelajaran handal guru merupakan meningkatkan serta memperlengkapi tamatan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran akibatnya tamatan selaku guru handal. Standar kompetensi guru itu dijamah dengan 2 tingkatan pembelajaran ialah pembelajaran S1 serta pembelajaran karier guru yang digeluti selaku terus-menerus. Standar kompetensi tamatan pada pembelajaran S1 merupakan memahami kompetensi akademik, sebaliknya standar kompetensi

yang mau dijamah pada program pembelajaran karier guru merupakan kompetensi handal (Re-Desain pembelajaran handal Guru: 2010). Pembelajaran handal guru mampu dilintasi dengan dua tingkatan pembelajaran ialah pembelajaran S1 serta pembelajaran karier guru. Pembelajaran karier guru memperlengkapi serta meningkatkan kompetensi handal dengan aplikasi menggembleng pada seting asli setra dengan mengimplementasikan kompetensi akademik yang dijamah pada pembelajaran S1. Guna kebutuhan itu, hingga dibutuhkan kualifikasi serta kompetensi asal muasal daya khalayak, ialah dosen PPG yang melengkapi persyaratan.

Termampu 11 persyaratan minimum dosen PPG, cakap yang berkarakter administrasi atau kompetensi, persyaratan itu merupakan: tahapan pembelajaran minimum S2, ada lingkungan balik ke pembelajaran, ada bagian keterampilan ke pembelajaran, lektor, masa operasi minimum lima tahun, ada ijazah dosen, sukses penyetaraan Dosen Gurniwan lengkap Pasya, Pemukiman warga Perkotaan 53 PPG, ada kompetensi perihal studi kegiatan golongan (PTK), ada kompetensi perihal kodifikasi peranti pengajian pengkajian, ada kompetensi supervise klinis (pedoman Program pembelajaran job Guru, 2010).

Efisiensi program pembelajaran karier guru dipengaruhi oleh elemen perkakas prasaran pendukung ketercapaian standar cara pada penerapan tindakan workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). Gerakan workshop SSP digeluti dengan 8 tahapan, adalah: pleno 1, silang pendapat regu, kerja kelompok/mandiri, pleno 2 (peer teaching), perbaikan, persetujuan konsep penerapan pengajian pengkajian (RPP), microteaching, refleksi serta perbaikan (pedoman Program pembelajaran job Guru: 2010). Dalam menghasilkan Guru yang handal, masing-masing pihak ada kedudukan, antara lain:

a) Peran LPTK, selaku "kawah candradimuka" buat pembelajaran calon Guru yang penuh; cara rekrutmen yang hati-hati; banyak memberikan jatah praktek, cakap untuk membuat etika karier atau ketrampilan lain, meningkatkan bermacam inovasi buat memperkaya kepiawaian serta membuat individu calon Guru, bertindak selaku instansi penguatan kemampuan, membuat kerjasama serta sinergitas kedudukan dengan unsur/stake holder terkait.

b) Peran Guru, peresapan karier. Guru adalah karier opsi serta bukan karier pilihan dengan segala konsekuensinya, pengembangan karier selaku buatan integral yang dilaksanakan selaku inheren dengan penerapan TUPOKSI Guru, dalam rang meninggikan handalisme serta bukan penambahan jenjang semata, selaku tidak berubah-ubah serta konsekuen, mencari akal membuat individu selaku penyanggtag jabatan karier yang kompeten;

c) Peran penguasa, perbaikan manajemen serta penerapan wewenang manajemen Guru selaku lebih pas; kepekatan pelaksanaan reward and punishment; menyiapkan bermacam instrumen yang dibutuhkan, fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi KKG/MKKS/MGMP, tindakan bintek teknis yang lengkap, penyediaan perantara rasional, alat turnamen, kelompok pengembangan profesi, meningkatkan profesi selaku inheren-adaptif sertakontinyu).

Sebagai penerapan jelas dari usaha-usaha serta kedudukan-kedudukan dishubungan, hingga penguasa akan melakukan kebijakan pembelajaran job Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi arahan buat melaksanakannya. Dalam cara penerapannya, PPG diiringi oleh tamatan S1 Kepembelajaran atau S1/DIV non- Kepembelajaran (telah menempuh 144-160 sks) yang ada keterarikan serta gelagat buat selaku Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih pembelajaran ekstra buat mampu selaku Guru handal (menemukan 18-20 sks buat PGPAUD/PGSD serta 36-40 sks buat PGSMTP-PGSMTA).

Dari definisi itu, hingga tidak mampu dibalang jika PPG ialah urat pintas buat selaku guru profesional, melainkan urat yang sungguh susah serta lama buat ditempuh. Terlebih buat mampu mencontoh PPG ini, calon pendaftar jua diharapkan mencontoh SM-3T adalah ahli menggembleng di daerah terisolasi, Terluar, serta terdahulu dari daerah Republik Indonesia. Sesudah sukses dari PPG, hingga mereka akan mengantongi titel Gr. Serta terkini mampu selaku CPNS. PPG ini jua dipecah selaku dua, adalah pembelajaran prajabatan serta pembelajaran dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mencontoh PPG ini jua harus diselaraskan dengan keinginan (supply and demand) (Pangestika & Alfaria, 2015).

Kegiatan Penasuhan job Guru (PPG) berharga buat Guru, dimana:

- Memperoleh pengalaman perihal metode berfikir serta bertugas selaku interdisipliner akibatnya mampu memahami perihal sangkutan ilmu dalam menangani kasus tutoran yang ada disekolah.
- Menambah pengalaman serta peresapan guru perihal cara pembelajaran serta pengajian pengkajian disekolah.
- Mempertajam daya akal dalam penelaahan perumusan serta pemecahan masalah pembelajaran yang ada disekolah.
- Memberikan peluang terhadap mahamurid buat mampu bertindak selaku motivator, dinamisator, dan menjadikan filsafat selaku persoalan solver dalam pengajian pengkajian (Ningrum, 2012).

Guna buat Sekolah adalah menciptakan penyegaran dan ide-ide terkini dalam cara membiasakan cakap sistem pengajarannya atau tugas-tugas kepengembangan lainnya akibatnya diharapkan contoh pemembiasakan akan selaku lebih cakap. Melainkan itu, dengan terdapatnya calon guru praktikan mampu memberikan warna terkini walau dalam periode yang relatif sedikit. Akibatnya menguatkan siswa mengantongi masukan maupun impuls paling utama yang berhubungan dengan pembelajaran teratas yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masa berikutnya. Sedangkan khasiat buat rakyat adalah cawisnya calon-calon pendidik yang ada mutu yang baik akan meningkatkan impuls rakyat buat makin konsisten dan mengakui jika mayapada pendidikan mampu membeirkan servis yang lumayan meriangkan. Tentang ini akan menekan rakyat buat lebih ikut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh penguasa. Kapabilitas dan kekurangan PPG dapat diamati dari grafik di dasar ini:

Tabel 1. Kapabilitas dan kekurangan PPG

Kelebihan PPG	Kekurangan PPG
1. Menciptakan guruyang rofesional Meningkatkan kesejahteraan guru	1. Biaya dalam menempuh PPG mahal
2. Semua sarjana non kependidikanbisa masuk PPG	2. Sosialisasi belum maksimal
	3. Banyak guru yang belum bisakeluar dari zona nyamannya

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan nasional beroperasi meningkatkan kepiawaian dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bergengsi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fakta tugas pendidikan menguatkan meningkatkan kemampuan kontestan didik supaya selaku khalayak yang berkeyakinan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha menyatukan, bermoral agung, sehat, bijaksana, cakap, inventif, mandiri, dan selaku penduduk negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru memiliki rol yang sungguh diplomatis dalam kerangka melaksanakan tugas dan menghasilkan tujuan pendidikan nasional seperti mana dituturkan di atas. Anggota didik saat ini ialah khalayak masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pemahaman dan teknologi, cakap, berkepribadian dan bertabiat kebangsaan, dan selaku insan agamis.

Peran guru nyaris tidak mampu digantikan oleh yang lain, terutama di dalam rakyat yang multikultural dan multidimensional, dimana kedudukan teknologi buat menukar tugas-tugas guru sedang sungguh sedikit. Seumpama pun teknologi pengajian pengkajian tersedia menggenapi, peran guru yang sebetulnya tidak akan tergantikan. Asal usul pendidikan di Indonesia mencatatkan jika profesi guru sebagai profesi yang diketahui esensialnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Keterampilan Profesional Guru dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Sekolah Dasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmarani, N. (2014). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Di Sekolah Dasar. *Bahana Manajemen Pendidikan /Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 60–78. Retrieved From <File:///E:/3791-7883-1-Sm.Pdf>
- Besharov, D. J., & Oser, J. (2014). Teaching In Today's Global Classroom: Policy Analysis In Cross-National Settings. *Journal Of Public Affairs Education*, 19(3), 381–387.

- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis* (Fifth). New York: Routledge.
- Fattah, N., & Latifah, P. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Goodwin, A. L. (2014). Globalization And The Preparation Of Quality Teachers: Rethinking Knowledge Domains For Teaching. *Teaching Education*, 21(1), 19–32.
- Gunawan, R. (2013). Implementasi Pengembangan Profesionalisme Bagi Guru. *Journal Of Socius*, 5(2), 89–103.
- Retrieved From
[Http://Repository.Uhamka.Ac.Id/12/1/2011JurnalSociusMakalahRudyG.Pdf](http://Repository.Uhamka.Ac.Id/12/1/2011JurnalSociusMakalahRudyG.Pdf)
- Haddad, W. D. (2013). *Education Policy-Planning Process: An Applied Framework* (Fifth). United States: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Hanushek, E. A. (2015). Policy Analysis: Is It, Or Could It Be, The Fifth Estate? *Association For Public Policy Analysis and Management*, 4(3), 340–354.
- Kimshanov, K., & Dyikanbaeva, T. (2015). Teacher Professional Development and Appraisal. *Tarbiya: Journal Of Education In Muslim Society*, 2(2), 146–152.
- Masnyur, T. (2012). Pengembangan Profesi, Kecerdasan Emosional Dan Sikap Profesional Guru Sekolah Dasar.
- Mead, L. M. (2015). Teaching Public Policy: Linking Policy And Politics. *Journal Of Public Affairs Education*, 389(193), 389–403.
- Mustofa. (2017). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4(1), 68–84.
- Ningrum, E. (2012). Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (Ppg). *Jurnal Pendidikan Geografi*, 12(2), 61–70.
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 4(1), 40–51.
- Petrie, K., & Mcgee, C. (2012). Teacher Professional Development: Who Is the Learner? *Australian Journal of Teacher Education*, 37(2), 34–56. <https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n2.7>
- Phillips, P. (2013). Professional Development As A Critical Component Of Continuing Teacher Quality. *Australian Journal Of Teacher Education*, 33(1), 120–134.
- Rahman, B. (2014). Refleksi Diri Dan Peningkatan Profesionalisme Guru. *Jurnal Paedagogia*, 17(1), 1–12.
- Sobri, Y. A. (2016). Model-Model Pengembangan Profesionalisme Guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VIII Tahun*, 4(2), 55–67. Retrieved From [Http://Ap.Fip.Um.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2016/10/](http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/Artikel-Konaspi-Ay-Sobri.Pdf) Artikel-Konaspi-Ay-Sobri.Pdf
- Supriadi, O. (2013). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Tabulrasa Pps Unimed*, 6(1), 32–45.
- Tilaar, H. A., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2012). Teacher Professional Learning And Development: Best Evidence Synthesis Iteration [Bes]. *Ministry Of Education*, 3(1), 130–153. Retrieved From [Http://Www.Oecd.Org/Edu/School/48727127.Pdf](http://www.oecd.org/edu/school/48727127.pdf)
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Public Policy: Concepts And Practice* (Sixth). New York: Routledge.